



LAPORAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PERIODE OKTOBER 2020 - DESEMBER 2020



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2, Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan

“Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani, Akuntabel”



0517-21032



www.pn-kandangan.go.id



[pengadilan negeri kandangan](https://www.facebook.com/pengadilan.negeri.kandangan)



[pnkandangan](https://www.instagram.com/pnkandangan)



pn_kandangan@yahoo.co.id

PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

Berdasarkan :

Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor 52 Tahun 2014
Tentang
Pedoman Pembangunan
Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih serta melayani

Disahkan : di Kandangan

Pada : Hari Senin, tanggal 4 Januari 2021

Top Management

DIAN ERDIANTO, SH., MH

Manager Representatif


INRI NOVA SIHALOHO, SH., M.H.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq dan inayah-NYA. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan harapan kita sebagai kaumnya selalu mendapatkan syafa'atnya.

Selanjutnya, Tim Survei telah menjalankan tugasnya untuk memperoleh data pendukung guna menyusun laporan ini yaitu berupa ungkapan pendapat Pengunjung Pengadilan mengenai pengalaman yang diperoleh saat memerlukan informasi dan Standar Pelayanan yang sudah diterapkan oleh Petugas Pelayanan khususnya di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Survei ini untuk memberikan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara berjenjang dan berkala, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas kepuasan yang maksimal dan selalu performan. Ramah dalam melayani, tertib, menarik dan berkemampuan untuk mewujudkan berdaya guna dan berhasil guna di dalam memberikan pelayanan bagi Pengunjung Pengadilan.

Demikian kata pengantar ini dibuat, dengan pengharapan kritik dan saran senantiasa tetap kami perlukan untuk tetap mengedepankan mutu pelayanan sesuai dengan Motto, yaitu Pelayanan yang "PRIMA" (Profesional, Ramah, Inovatif, Melayani dan Akuntabel).

Kandangan, 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



DIAN ERDIANTO, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud Dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Rencana Kerja	2
1.4.1 Persiapan.....	2
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	3
1.4.3 Metode Survei.....	3
BAB II.....	4
METODOLOGI	4
2.1 Metode Penelitian	4
2.2 Populasi Dan Sampel	4
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	4
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan <i>Quality Control</i>	4
2.5 Teknik Analisis Data	5
2.6 Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III.....	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	8
3.1 Profil Responden.....	8
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden.....	8
3.1.2 Pekerjaan responden.....	8
3.1.3 Domisili responden.....	9
3.1.4 Kelompok Usia Responden	9
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per indikator	9
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan.....	9
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan	10
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh.....	11

3.2.4	Indikator Transparansi Biaya.....	12
3.2.5	Indikator Transaksi Rahasia.....	13
3.2.6	Indikator Biaya Tambahan.....	14
3.2.7	Indikator Hadiah.....	15
3.2.8	Indikator Transparansi Pembayaran.....	16
3.2.9	Indikator Percaloan.....	17
3.2.10	Indikator Perbuatan Curang.....	18
3.3	Indeks Persepsi Korupsi Satun Kerja pada pengadilan.....	19
3.4	Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	20
BAB IV.....		22
PENUTUP.....		22
4.1	Kesimpulan.....	22
4.2	Rekomendasi Tindak Lanjut.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK).....	6
Tabel 2. Nilai Persepsi.....	7
Tabel 3. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
Tabel 4. Jenis Pekerjaan Responden.....	8
Tabel 5. Usia Responden.....	9
Tabel 6. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
Tabel 8. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh.....	11
Tabel 9. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya.....	12
Tabel 10. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	13
Tabel 11. Indeks pada Indikator Tambahan Biaya.....	14
Tabel 12. Indeks pada Indikator Hadiah.....	15
Tabel 13. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran.....	16
Tabel 14. Indeks pada Indikator Percaloan.....	17
Tabel 15. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	18
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan.....	19
Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.....	20
Tabel 18. Isian masukan & pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan .	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
Grafik 2. Indeks pada penyalahgunaan jabatan	11
Grafik 3. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh	12
Grafik 4. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya	13
Grafik 5. Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia.....	13
Grafik 6. Indeks pada Indikator Tambahan Biaya	14
Grafik 7. Indeks pada Indikator Hadiah.....	15
Grafik 8. Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran.....	16
Grafik 9. Indeks pada Indikator Percaloan.....	17
Grafik 10. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang.....	18
Grafik 11. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani, Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berkomitmen dan konsisten dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan melakukan survei yang selanjutnya didapat ukuran yang disebut dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dengan indeks yang diperoleh merupakan salah satu parameter Satuan Organisasi Pemerintahan yang bersih serta melayani.

Pengadilan merupakan Satuan Kerja dibawah Mahkamah Agung dan sebagai mitra Pemerintahan diharapkan merupakan Satuan Kerja yang mampu melaksanakan fungsi pelayanan dan menjadi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani, maka diperlukan dukungan dari masyarakat untuk mengkritisi dalam memberikan layanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pengadilan khususnya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud, Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan, Penyusunan Laporan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih serta Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan :

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Hakim Pengawas). Tugas Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

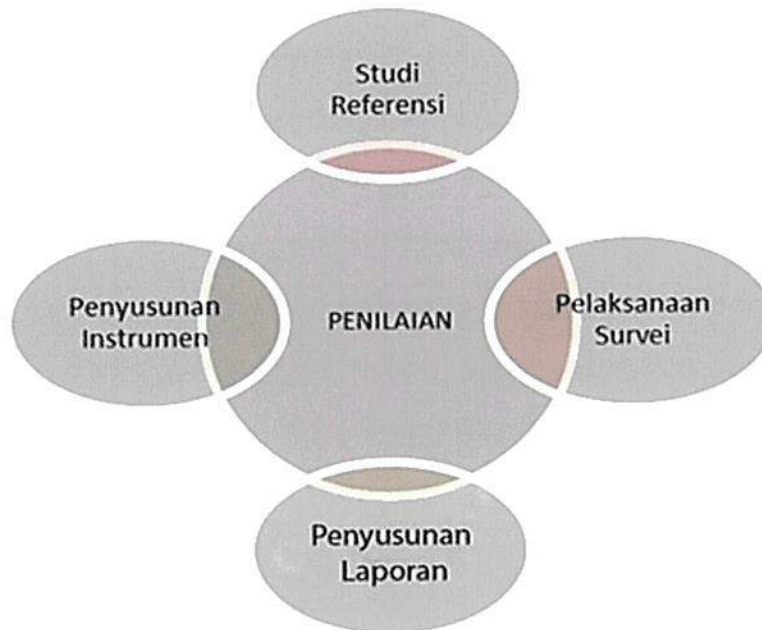
- **Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan.

Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1
Alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi (IPK)

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mayoritas memiliki latar SLTA dan S1.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0.0
2	SD	5	5.0
3	SMP/SLTP	18	18.0
4	SLTA	45	45.0
5	Diploma (D1, D2, D3, D4)	7	7.0
6	S1	25	25.0
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0.0
Jumlah		100	100.0

3.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 23% responden pengguna layanan Pengadilan memiliki pekerjaan Wiraswasta/Usahawan dan Lainnya.

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	5	5.0
2	TNI/Polri	19	19.0
3	Pegawai Swasta	14	14.0
4	Wiraswasta/Usahawan	23	23.0
5	Petani	2	2.0
6	Pedagang	9	9.0
7	Pelajar / Mahasiswa	5	5.0
8	Lainnya	23	23.0
Jumlah		100	100.0

3.1.3 Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.1.4 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 19 tahun s/d 30 tahun. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 19 tahun.

Tabel 5
Usia Responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	<18	0	0
2	19-30	41	41.0
3	31-40	35	35.0
4	41-50	18	18.0
5	51-60	6	6.0
6	61>	-	-
7	Tidak mencantumkan Usia	-	-
	Jumlah	100	100

3.2 Indeks Persepsi Korupsi per indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan.

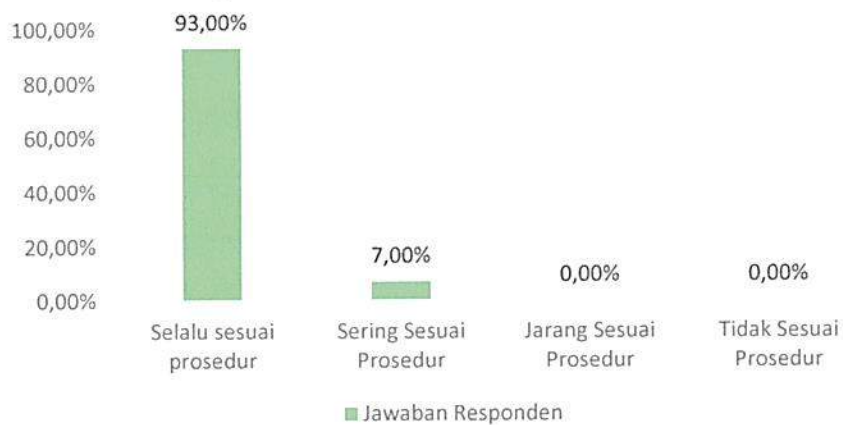
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari Korupsi

Tabel 6
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu sesuai Prosedur	4	93	93.0
2	Sering sesuai Prosedur	3	7	7.0
3	Jarang sesuai Prosedur	2	0	0
4	Tidak sesuai Prosedur	1	0	0
Jumlah			100	100.0

Grafik 1
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indicator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index ke 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari korupsi

Tabel 7
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Petugas melayani tanpa meminta imbalan	4	96	96.0
2	Petugas melayani jarang meminta imbalan	3	4	4.0
3	Petugas melayani sering meminta imbalan	2	0	0
4	Petugas melayani selalu meminta imbalan	1	0	0
Jumlah			100	100.0

Grafik 2
Indeks pada penyalahgunaan jabatan
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari Korupsi

Tabel 8
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	89	89.0
2	Jarang/Pernah	3	11	11.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.0

Grafik 3
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4 Indikator Transparansi Biaya.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB selalu melakukan transparansi Biaya

Tabel 9
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	90	90.0
2	Sering	3	10	10.0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 4
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya



3.2.5 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah ada Transaksi Rahasia

Tabel 10
Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	92	92.0
2	Jarang/Pernah	3	8	8.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 5
Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Tabel indeks pada Indikator Transaksi Rahasia



3.2.6 Indikator Biaya Tambahan

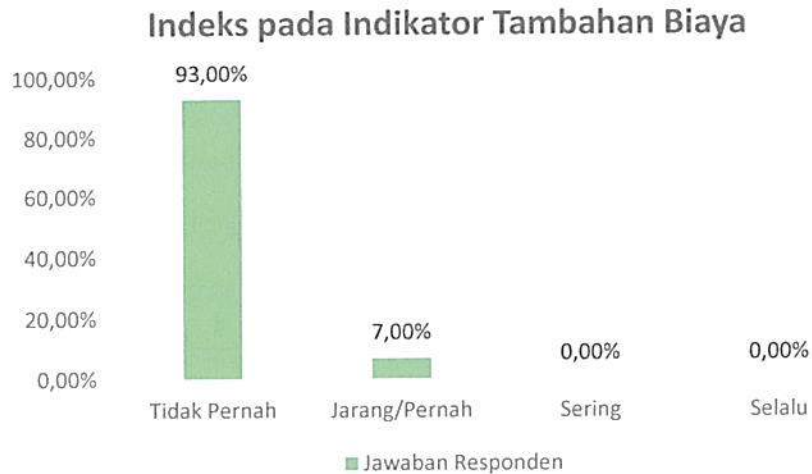
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah terdapat tambahan biaya dan selalu membayar sesuai tarif.

Tabel 11
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	93	93.0
2	Jarang/Pernah	3	7	7.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 6
Indeks pada Indikator Tambahan Biaya



3.2.7 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah meminta tanda terima kasih dalam pelayanan

Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	91	91.0
2	Jarang/Pernah	3	9	9.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 7
Indeks pada Indikator Hadiah

Indeks pada Indikator Hadiah



3.2.8 Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 1.

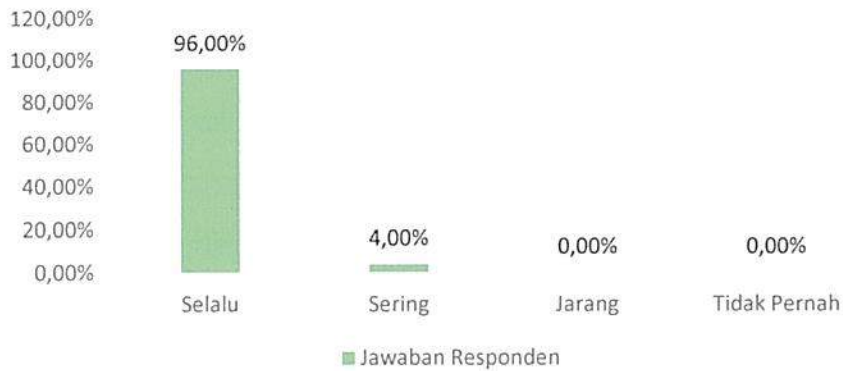
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak pernah menggelembungkan biaya

Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Selalu	4	96	96.0
2	Sering	3	4	4.0
3	Jarang	2	0	0
4	Tidak Pernah	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 8
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran



3.2.9 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	97	97.0
2	Jarang/Pernah	3	3	3.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 9
Indeks pada Indikator Percaloan

Indeks pada Indikator Percaloan



3.2.10 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 1.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tidak terdapat praktek KKN

Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	95	95.0
2	Jarang/Pernah	3	5	5.0
3	Sering	2	0	0
4	Selalu	1	0	0
Jumlah			100	100.00

Grafik 10
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satun Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebesar 3.93.

Tabel 16
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
1	Manipulasi Peraturan	3,93
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,96
3	Menjual Pengaruh	3,89
4	Transaksi Biaya	3,90
5	Biaya Tambahan	3,92
6	Hadiah	3,93
7	Tranparansi Biaya	3,91
8	Percaloan	3,96
9	Perbuatan Curang	3,96
10	Transaksi Rahasia	3,95

Grafik 11
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan

Indeks Persepsi Korupsi



Indeks 3.93 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 4.

Tabel 17
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

No.	Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

3.4 Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
1	Pelayanannya sangat-sangat bagus dan baik juga orang-orangnya ramah dalam melayani pemohon
2	Semangat dalam bekerja dan diberikan pelayanan yang lebih baik lagi
3	selalu menjalankan sesuai prosedur
4	pertahankan pelayanan yang sudah baik dan memuaskan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.93
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3.96
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3.89
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.90
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.92
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.93
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3.91
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.96
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.96
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3.95

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB (Periode Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020) tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.90 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut ada tiga (3) nilai terendah survei yang diperoleh yaitu : Indikator Menjual Pengaruh, Indikator Transaksi Biaya dan Indikator Transparansi Biaya. Oleh karena itu perlu peningkatan kualitas pelayanan dalam tiga (3) indikator tersebut sehingga indikator tersebut bisa bertambah dan lebih baik.



LAMPIRAN

KUESIONER :

NO	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
1.	Prosedur	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1. Tidak sesuai Prosedur 2. Jarang sesuai Prosedur 3. Sering sesuai Prosedur 4. Selalu sesuai Prosedur
2.	Layanan Pengadilan	Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1. Petugas melayani selalu meminta imbalan 2. Petugas melayani sering meminta imbalan 3. Petugas melayani jarang meminta imbalan 4. Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3.	Pengurusan Pelayanan	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1. Selalu 2. Sering 3. Jarang atau Pernah 4. Tidak Pernah
4.	Biaya / Tarif	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1. Sulit 2. Agak Sulit 3. Mudah 4. Sangat Mudah
5.	Tarif Resmi Spesifikasi	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1. Tidak Pernah 2. Jarang atau Pernah 3. Sering 4. Selalu
6.	Tanda Terima Kasih Pelaksanaan	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1. Selalu 2. Sering 3. Jarang atau Pernah 4. Tidak Pernah
7.	Bukti Transaksi Pelaksanaan	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah pembayaran dilakukan ? (Transparansi Biaya)	1. Tidak Pernah 2. Jarang atau Pernah 3. Sering 4. Selalu
8.	Pengurusan Layanan Pelayanan	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? (Percaloan)	1. Selalu 2. Sering 3. Jarang atau Pernah 4. Tidak Pernah
9.	Praktek KKN Pengadilan	Apakah pernah melihat dan / atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? (Perbuatan Curang)	1. Selalu 2. Sering 3. Jarang atau Pernah 4. Tidak Pernah
10.	Mengurus Perkara	Pernah Mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar persidangan ? (Transaksi Rahasia)	1. Selalu 2. Sering 3. Jarang atau Pernah 4. Tidak Pernah

PETUGAS PELAKSANA :

1. Petugas :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama :
- Tanda Tangan :
- Tanggal Pelaksana :



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15-U2/..../SK/KPN/2/2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Kandangan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Untuk melakukan pengukuran dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada komponen hasil pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi korupsi sehingga pada hasil survey ini nantinya diperoleh suatu indeks yang menggambarkan persepsi korupsi dan pemangku kepentingan terhadap Pengadilan Negeri Kandangan.
 - c. Bahwa dengan adanya promosi saudara Baidhowi dari Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB menjadi Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 22/DJU/SK/KP04.5/1/2020 tanggal 26 Januari 2020 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Umum .
 - d. Bahwa Hakim dan PNS yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah.
9. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang pengawasan dan hasil evaluasi.
10. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan peradilan.
11. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMS/096/SK/X/2006 tentang tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Nomor: W15.U2/113/SK/KPN/11/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Penunjukan Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Menunjuk Hakim dan PNS yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- KETIGA** : Tugas Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi adalah :
a. Melakukan survey indeks persepsi korupsi.
b. Membuat Hasil Survey dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan.
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berhenti setelah ada pencabutan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Nomor : W15-U2/53. /SK/KPN/2/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

**PENUNJUKKAN TIM SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- PELINDUNG : KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
- TIM PENGARAH : BUKTI FIRMANSYAH, SH. MIL.
R. SOESANTYO ARIBOWO, SH.
- TIM SURVEI :
 1. KETUA : BAIDHOWI
 2. WAKIL KETUA : NOOR MAHDALINA, SH.
 3. SEKRETARIS : DONY ANDRI RODESE PURBA, A. Md.
- PETUGAS SURVEY : MUKSALMINA, SH.
HENDERA IRAWAN, SH.
RACHMADIANSYAH, SH.
YAZID FAKHRI

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jl. Pangeran Antasari No. 2 Kandangan Telp (0517) 21024 –21032
Kandangan 71211

Email : pn_kandangan@yahoo.co.id, Website : <http://pn-kandangan.go.id>

Kandangan, 04 Januari 2021

Nomor : W15.U2/16/OT.01/01/2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan Monitoring dan Evaluasi

Kepada Yth :

Anggota Tim Survey IKM dan IPK

Pengadilan Negeri Kandangan

Di-

Kandangan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Periode Oktober – Desember 2020, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Januari 2021
Pukul : 09.00 WITA s/d Selesai
Ruang : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kandangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya sebelumnya diucapkan terima kasih.



Panitera Muda Hukum
Sebagai Ketua Tim Survey
Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Baidhowi



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jalan Pangeran Antasari No.2

Telepon : (0517) 21024 – 21032 / Fax. (0517) 21024 - 21032

email : pn_kandangan@yahoo.co.id website : www.pn-kandangan.go.id

FORM DAFTAR HADIR

TANGGAL : 05 Januari 2021

TEMPAT : Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Kandangan

AGENDA : Monitoring dan Evaluasi atas Laporan IKM dan IPK

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Baidhawi	Panmud Hukum	
2	Hoor Mahdama	pan mud pie	
3	Yasid Fakhri	PPNPN	
4	Hendera branson	PPNPN	
5.	Mukrahman	ppnpu	
6.	Pachnadiyand	ppnpu	



Panitera Muda Hukum

Selaku Ketua Tim Survey

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Baidhawi



**BERITA ACARA MONITORING DAN EVALUASI ATAS LAPORAN
INDEKS PERSEPSI KORUPSI PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2020
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Kandangan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public salah satunya melalui Indeks Persepsi Korupsi.

Berdasarkan Laporan Hasil survei Persepsi Korupsi Triwulan IV atau Periode Oktober - Desember tahun 2020 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan, diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Kandangan, memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,93 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan hasil survey dari indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	INDEKS
1	Manipulasi Data	3.93
2	Penyalahgunaan Jabatan	3.96
3	Menjual Pengaruh	3.89
4	Transaksi Biaya	3.90
5	Biaya Tambahan	3.92
6	Hadiah	3.93
7	Tranparansi Biaya	3.91
8	Percaloan	3.96
9	Perbuatan Curang	3.96
10	Transaksi Rahasia	3.95
IPK		3.93

Rekomendasi

Ketua Pengadilan Negeri beserta jajaran Pejabat Struktural akan melakukan pembinaan secara rutin kepada seluruh pegawai dan petugas di Pengadilan Negeri Kandangan baik Pegawai teknis maupun administrasi agar tidak melakukan Korupsi sehingga nilai IPK meningkat dan terwujud WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) sehingga Masyarakat akan memperoleh keadilan dan pelayanan yang baik yang merupakan tujuan dari penegakan hukum. Untuk ke depan Petugas Survey supaya lebih baik dalam menjalankan Survey dengan menentukan Responden yang tepat dan selektif serta representative serta memberikan pendampingan dalam pengisian Kuesioner, karena Responden masih ada yang kurang mengerti dalam menjawab pertanyaan dalam Kuesioner. Terkadang masih ada responden yang salah mengisi dan tidak tau apa maksud dari pertanyaan tersebut. Oleh karena itu agar petugas dapat melakukan pendampingan.

Terkait tiga peringkat terbawah, yaitu Indikator Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya dan Transparansi Biaya, agar ketiga indikator tersebut mendapat perhatian lebih dan di carikan solusinya sehingga dapat meningkatkan nilai IPK Pengadilan Negeri Kandangan.

Tindak Lanjut

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kandangan mengingatkan Pengawas PTSP untuk aktif mengawasi dan melakukan supervisi terhadap kinerja petugas PTSP sesuai dengan SK Nomor W15-U2/786/SK/KPN/01/2021 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB. Selain itu Ketua Pengadilan Negeri selaku Top Manager) akan mengadakan pembinaan terhadap para pegawai dan Petugas PTSP dan akan dilakukan monitor dan Evaluasi kemudian secara rutin setiap tiga bulan sekali.

Terkait tiga peringkat terbawah, mengenai indikator Transparansi Biaya dan Transaksi Biaya, akan dilakukan sosialisasi lebih intens baik lewat media sosial dan website Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga indikator tersebut bias lebih baik dan Pengadilan Negeri Kandangan sangat berkomitmen untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas sehingga di pastikan tidak ada biaya

yang dibayarkan melebihi atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu terkait dengan Indikator Menjual Pengaruh, akan dilakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan sehingga dapat meminimalisir Pengaruh yang sangat kuat.

Kandangan, 05 Januari 2021

Ketua Tim Survey,





PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Jalan Pangeran Antasari No.2

Telepon : (0517) 21024 – 21032 / Fax. (0517) 21024 - 21032

email : pn_kandangan@yahoo.co.id website : www.pn-kandangan.go.id

DOKUMENTASI

